

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, dan wajib di bayarkan sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung, yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Sumarsan, 2015). Pemerintah dalam suatu Negara dapat dikatakan baik, jika dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan disegala bidang, yang tentunya didukung dari sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang diperoleh Negara adalah dari sektor pajak.

Ada 2 sumber pendapatan yang dimiliki oleh Indonesia, yang pertama PNBP (Penerimaan negara bukan pajak) dan kedua adalah pajak. Pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. (Akbar,2019)

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkat pemerintah daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kab/kota. Penggolongan pajak diatas diatur dalam undang-undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam undang-undang No 34 Tahun 2000. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapat asli daerah (PAD), Khususnya pajak kendaran bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (PBBNKN) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah (Akbar, 2019).

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah didapat melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Alasan dipungutnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah untuk menutupi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor, seperti dampak lingkungan dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat, diantaranya digunakan untuk membiayai sarana jalan umum yang rusak akibat penggunaan kendaraan bermotor. Jadi tujuan dipungutnya pajak secara umum adalah untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Akuntansi keperilakuan membahas bagaimana perilaku manusia memengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnis serta bagaimana informasi akuntansi tersebut memengaruhi perilaku manusia dan keputusan-keputusan bisnis (Supriyono, 2018). Akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan (Suartana, 2010:1). Informasi ekonomi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, tetapi juga data-data nonkeuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan (Ardiansyah, 2009). Akuntan ilmu keperilakuan memfokuskan pada hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, mereka menyadari bahwa proses akuntansi termasuk di dalamnya meringkas sejumlah kejadian ekonomi dimana hal-haltersebut merupakan akibat dari perilaku manusia dan bahwa pengukuran akuntansi yang mereka lakukan dapat memengaruhi perilaku, yang menentukan sukses tidaknya kejadian ekonomi (Hasnianti & Jamaludin, 2019).

Manajemen menetapkan kebijakan untuk mengatur fungsi, tugas dan cakupan pekerjaan yang dilakukan oleh Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Audit Internal sesuai dengan arahan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tugas untuk memastikan bahwa seluruh karyawan serta aktivitas perusahaan telah memenuhi dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta SOP perusahaan, memastikan bahwa produk-produk yang telah ada dan akan diadakan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, membuat kajian strategi manajemen risiko dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan strategi manajemen risiko, dan berkoordinasi dengan Pejabat Penanggung Jawab Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan divisi terkait lainnya dalam perusahaan dalam upaya pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan APU dan PPT.

Dijayapura sendiri, pertumbuhan kendaraan bermotor semakin bulan semakin meningkat hampir 2.000 unit kendaraan. Hal ini akan mengakibatkan bertambah pula jumlah penerimaan pajaknya. Dari pertumbuhan kendaraan setiap bulan, jenisnya didominasi kendaraan bermotor roda dua sebesar 80%, sisanya adalah mobil, truk, dan jenis lainnya (Justin,2018). Jika pertumbuhan kenaikan jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan sikap wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak, maka akan mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah menurun, dan daerah tidak dapat melakukan pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki jalan-jalan yang rusak, dll.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya bahkan setiap bulannya. Faktor-faktor tersebut antara lain kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi yang menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk saat ini, juga syarat untuk memiliki kendaraan motor itu sendiri sangatlah mudah. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini syarat untuk pembelian sepeda motor sangatlah mudah dan dealer-dealer pun menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Dengan kondisi ini, diharapkan penerimaan pendapatan

pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor (Putri & Jati, 2012).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. *Self assessment system* yang kini dianut Indonesia dalam hal pemungutan pajak memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terwujud apabila adanya kesadaran wajib pajak (*taxconsciousness*) dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika ada kesadaran dari wajib pajak maka sikap patuh, taat, dan disiplin akan muncul. Penelitian (Marjan, 2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Putri, 2012) bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Pelayanan prima dari petugas terkait yang meliputi bantuan yang diberikan dalam pengisian, penyeteroran, dan pelaporan pajak sehingga wajib pajak paham dan mengerti akan kewajiban pajaknya serta kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan (Utomo, 2011) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Penelitian yang dilakukan (Putri, 2012) menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kendaraan bermotor dikota jayapura setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, berdasarkan data dari UPTB Samsat Kota Jayapura kendaraan bermotor yang terdaftar saat ini di Samsat Kota Jayapura sebanyak 211.439, - sedangkan jumlah kendaraan yang aktif membayar pajak sebesar 81.245,- ini artinya sebanyak 130.194,- kendaraan di Kota Jayapura tidak melakukan pembayar Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan di kantor SAMSAT Jayapura.

Banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak mengerti mengenai bagaimana tata cara pembayaran pajak, tata cara pelaporan pajak, fungsi dari dana pajak, penyaluran pajak, serta sanksi pajak. Ditambah lagi dengan adanya stigma negatif yang ada di masyarakat mengenai penyelewengan penggunaan dana pajak, yang mengakibatkan semakin sedikitnya masyarakat yang membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini yaitu dengan semakin gencarnya melakukan berbagai sosialisasi melalui poster ataupun dengan melakukan kerja sama dengan polisi yaitu dengan melaksanakan razia kendaraan bermotor dan menilang orang-orang yang melanggar aturan salah satunya belum membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya maka akan memberikan dampak jangka panjang dalam penerimaan pajaknya (Ariani, 2018).

Saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas serta kemudahan dalam proses perpajakan untuk masyarakat, begitu juga dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menambah tempat untuk pelayanan pajak

kendaraan bermotor, seperti menempatkan Samsat Corner di Mall Jayapura, Samsat keliling dan Samsat box/layanan Drive Thru. Dengan penambahan jumlah loket dan peningkatan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor diharapkan masyarakat akan lebih sadar serta patuh dalam membayar pajak kendaraannya. Tentu saja hal ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang akan meningkat seiring bertambahnya pembayaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Putri, 2012). melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. Variabel bebas yang digunakan ada empat yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan saksi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Denpasar. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah populasi sebesar 940.472 dengan jumlah sampel sebesar 100 responden yang diperoleh melalui *inccidental sampling*, yang kebetulan diketemui peneliti yang berada di Kantor Samsat Denpasar. Responden diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dan diberikan langsung oleh peneliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga variable bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan saksi perpajakan. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Samsat Kota Jayapura.

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan diatas, penelitian ini berjudul, **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jayapura”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk, mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait hal tersebut.

2. Mafaat Praktis

Sebagai usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal ini terdiri tiga bab, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini bersisi teori, konsep, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan metode penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, pengukuran dan analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dijelaskan hasil dan pembahasan penelitian yang telah didapatkan penulis yang mencakup gambaran umum penelitian, statistik deskriptif penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, hasil analisis regresi berganda, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, disimpulkan hasil dan pembahasan yang telah dibahas dalam BAB IV yang mencakup kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran